

**MENGGALANG USAHA KECIL MENGOPTIMALKAN
PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA**

Oleh : Dr. Zainuddin *)

Abstrak

Saat ini krisis telah menghantarkan kesulitan yang mendalam bagi ekonomi masyarakat Indonesia, terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pengangguran pekerja lebih dari 36 %, dan kebijakan pemerintah untuk memberdayakan usaha kecil masih belum signifikan. Pada hal usaha kecil mampu menyerap tenaga kerja sebesar 89 %, sedangkan usaha menengah dan besar hanya sebesar 11 %. Keberhasilan ekonomi rakyat sebenarnya terletak ditangan usaha kecil, sedangkan pengucuran dana pemerintah justru lebih banyak kepada usaha menengah dan besar. Oleh sebab itu sudah waktunya kembali menata manajemen usaha kecil dan menjadi perhatian segala pihak.

I. PENDAHULUAN

Diantara berbagai bentuk krisis (*resesi*) baik secara nasional maupun global, ternyata krisis ekonomi yang paling mendasar dirasakan masyarakat Indonesia, mulai dari kawasan Indonesia bagian barat, tengah dan timur. Oleh sebab itu kondisi ekonomi sudah mendesak diperbaiki, karena dampak kemerosotan ini tentu ada efek negatif dan memiliki batas waktu (*interval*), Sehingga diyakini pada suatu ketika sampai titik lebur dengan stadarisasi riil ekonomi. Maka masyarakat marginal tersebut mudah bergejolak untuk terpecah-pecah disebabkan kesenjangan ekonomi yang dapat meruntuhkan pola persatuan dan hilangnya sifat musyawarah (Hengki Rawi, 2000). Gejolak

semacam ini akan mengarah pada bentuk kere-

takan persatuan bangsa, timbul pengangguran, gejolak politik, konflik etnis, dan kemelaratatan individual (M. L. Jhingan, 1983, dan HAR. Tilaar, 1997).

Meskipun kondisi pahit sudah dirasakan oleh lapisan ma-syarakat bawah dengan persentase lebih kurang 65 %, ternyata masih dapat ditolong, karena krisis ekonomi sudah menjadi sesuatu yang biasa. Juga relatif tinggi populasi masyarakat lapisan bawah yang merasakan kesulitan ekonomi dan lapangan pekerjaan yang tidak menentu dan fluktuatif.

*) Dr. Zainuddin adalah Dosen FT UNIMED

Oleh sebab itu melalui usaha kecil akan dapat diperoleh langkah perbaikan dengan menerapkan polarisasi usaha kecil dengan dukungan pihak pemerintah dan masyarakat berupa pembinaan keterampilan dan pemberian pinjaman modal jangka panjang dengan ketentuan berbunga ringan.

II. PERBERDAYAAN SEKTOR USAHA KECIL DAN TENAGA KERJA

Strategi yang perlu ditempuh adalah member-dayakan sektor usaha kecil, yang merupakan jaring pengaman bagi ekonomi sosial dari waktu ke waktu. Terbukti bahwa pada saat krisis ekonomi melanda negeri ini, sektor usaha kecil memiliki fleksibilitas tinggi terhadap guncangan-guncangan krisis (Abdul Alim Parkinda, 2002).

Data BPS (2000), mengindikasikan bahwa dari jumlah 39.178.792 bidang usaha yang aktif, ternyata sekitar 99,85 % atau 39.121.350 diantaranya adalah usaha kecil. Pada 2001 diestimasi jumlah keseluruhan usaha mencapai 40.197.611 dan sekitar 99,9 % atau sebesar 40.137.773 diantaranya adalah bidang usaha kecil.

Sementara pada 2000 jumlah usaha menengah yaitu sebanyak 55.437 dan usaha besar sebanyak 2005, dan persentase keduanya adalah sebesar 0,15 %. Demikian pula pada 2001, jumlah usaha menengah dan besar masing-masing diperkirakan sekitar 57.743 dan 2.95, sehingga jumlah persentase tidak berbeda dengan tahun lalu. Di lain pihak penyerapan tenaga kerja disektor usaha kecil pada 2000 mencapai 63.501.890 orang dari total tenaga

kerja yaitu sebesar 71.518.701 orang atau sekitar 80 %.

Sedangkan pada 2001, penyerapan ini mencapai 65.246.294 orang dari jumlah tenaga kerja yaitu sebesar 73.646.008 orang, dengan jumlah persentase yang sama dengan tahun lalu. Data diatas menunjukkan bahwa sektor usaha kecil adalah sangat strategis untuk diberdayakan, dengan imfak yang bakal dicapai yaitu ; selain penyerapan tenaga kerja, juga meredam gejolak sosial dengan mengendalikan pengangguran, memungkinkan munculnya inovasi, merupakan upaya peningkatan skill dan kewirausahaan, implementasi kebijakan pemerataan tentang kesempatan berusaha, serta imfak-imfak lainnya. Karena itu berbagai upaya harus diarahkan kepada penciptaan lingkungan yang kondusif terhadap pem-berdayaan usaha kecil.

Akses kredit agar ditata logis dan rasional, dengan prioritas kepada jumlah pengusaha dan bukan kepada jumlah dana yang diusulkan (Abdul Alim Parkinda, 2000). Balai latihan keterampilan tenaga kerja atau lembaga pelatihan lainnya dari pemerintah agar di hidupkan secara kontinu dan memberikan pelatihan bermutu dan terarah kepada usaha kecil.

Berbagai persyaratan yang selama ini banyak menjerat dan membatasi ruang gerak usaha kecil, agar diperlonggar (Harjo, 2002,). Tempat-tempat usaha yang strategis untuk usaha kecil agar segera dibangun. Pajak tidak terlalu membebani sebelum usaha kecil benar-benar bergerak baik dan bisa berdiri sendiri. Dan program pembinaan dari pemerintah harus

PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN

diper-siapkan sejak dini. Keberhasilan yang diharapkan dari tumbuhnya usaha kecil adalah adanya stabilitas ekonomi yang mantap, dukungan berusaha dari peme-rintah, pemerataan kesempatan berusaha, serta dukungan terhadap Tabel 1. Perkembangan Unit Usaha

pertumbuhan ekonomi secara nasional. Dibawah ini disajikan perkembangan unit usaha kecil, menengah dan besar serta penyerapan tenaga kerja (lihat Tabel di bawah ini)

Unit usaha/ Tahun	1998	1999	2000	2001
Usaha kecil	36.671.689	37.859.509	39.121.350	40.137.773
Usaha menengah	51.889	52.214	55.437	57.743
Usaha besar	1.831	1.885	2.005	2.095
Jumlah	36.815.409	37.913.608	39.178.792	40.197.611

Sumber : BPS, 2000

Tabel 2. Penyerapan Tenaga Kerja

Unit usaha/ Tahun	1998	1999	2000	2001
Usaha kecil	57.341.962	9.939.760	39.121.350	40.137.773
Usaha menengah	6.971.611	7.230.084	55.437	57.743
Usaha besar	64.493	366.478	2.005	2.095
Jumlah	64.678.066	7.536.322	71.518.071	73.646.208

Sumber, BPS, 2000

III. HARUS MENDUKUNG PRODUKSI DALAM NEGERI

Kini kita dituntut untuk mempersiapkan diri menghadapi era liberalisasi ekonomi dunia, dengan istilah telah disepakatinya secara yuridis dan sosial tentang AFTA dan APEC. Bahwa APEC sebenarnya secara historis sosiologis telah di-cetuskan pertamakali oleh Roland Robertson dari University of Pittsburgh pada tahun delapanpuluhan. Oleh sebab itu di depan mata kita sebenarnya sudah terlihat dampak globalisasi tersebut yaitu dengan banyaknya produk-produk luar negeri yang masuk dan menguasai pasar dalam negeri Indonesia. Jika dalam bidang otomotif ternyata sudah menjadi pepadangan umum, dan belakangan ini masyarakat heboh dengan makanan impor paha ayam dari AS, masalah pendidikan, lembaga konsultan, atau produk-produk lainnya. Karena semuanya itu sudah mulai membanjiri pasar kita. Oleh sebab itu sudah saatnya kita mengadakan gerakan untuk cinta produk dalam negeri, dengan ketentuan bahwa mutu barang dalam negeri tidak jauh kalah dengan mutu barang ekspor. Di atas telah diuraikan tentang prospek perkembangan usaha kecil, dan kurang signifikannya usaha menengah dan besar dalam pemberdayaan sektor ekonomi dengan barometer penyerapan tenaga kerja.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Prilaku globalisasi tidak dapat dihambat dan dia akan bergulir terus sesuai dengan

situasi waktu, tempat, dan ruang,

2. Tingkat pengangguran tenaga kerja di Indonesia relatif tinggi lebih dari 36 % atau sebanyak 38 juta orang dan 550.000 orang adalah lulusan sarjana, sehingga peta seperti ini tidak bisa didiamkan terus menerus, dan butuh kiat untuk mengatasinya dengan memberdayakannya seoptimal mungkin sektor usaha kecil,
3. Bidang usaha kecil memiliki potensi untuk dikembangkan, selain memiliki modal dan tenaga kerja sedikit, namun perlu diberikan bimbingan dan bantuan secara baik.
4. Usaha kecil telah menjadi tumpuan harapan banyak lapisan masyarakat, disebabkan Indonesia masih masuk kategori negara "developing countries)

V. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Alim Parkinda, (2002). *Pendekatan Organisasi Pemerintahan Dalam Memecahkan Masalah Masyarakat*. Medan : UISU (makalah).
- Dodi Rachmat, (2002). *Jatuhnya Perekonomian Indonesia dan Alternatif Jalan Keluarnya Secara Organisasi*. Medan : UISU (makalah),
- Harjo, (2002). *Krisis Negara Indonesia (Multidimensi) Serta Upaya-Upaya*

PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN

- Penanggungulangnya. Medan :*
UISU (makalah).
- HAR. Tilaar, (1997), *Pengembangan Sumber Daya manusia dalam Era Globalisasi. Jakarta :* Grasindo.
- Hengki Rawai, (2002). *Jalan Keluar Keterpurukan Ekonomi Indonesia Secara Organisasi. Medan :* UISU, (makalah).
- M.L. Jhingan, (1983). *The Economics of Development and Planning. New Delhi :* Vicas Publishing House Ltd.
- Yacob Nuwawea, (2001). *Pengangguran di Indonesia. Jakarta :* Kompas 12 April 2002